

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj Kecamatan Baranti adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi

salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Baranti adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah ± 5.389 , Km², dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun jarak Kecamatan Baranti yang berkedudukan Ibu Kotanya berada di Kelurahan Duampanua dengan Ibu Kota Kabupaten ± 15 Km, mempunyai wilayah administratif yang terdiri dari 4 (empat) Desa dan 5 (lima) Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kulo
- Sebelah Timur : Kecamatan Pancarijang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Watangpulu
- Sebelah Barat : Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;

5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian;
- e. Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Baranti sebanyak 43 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 25 orang.

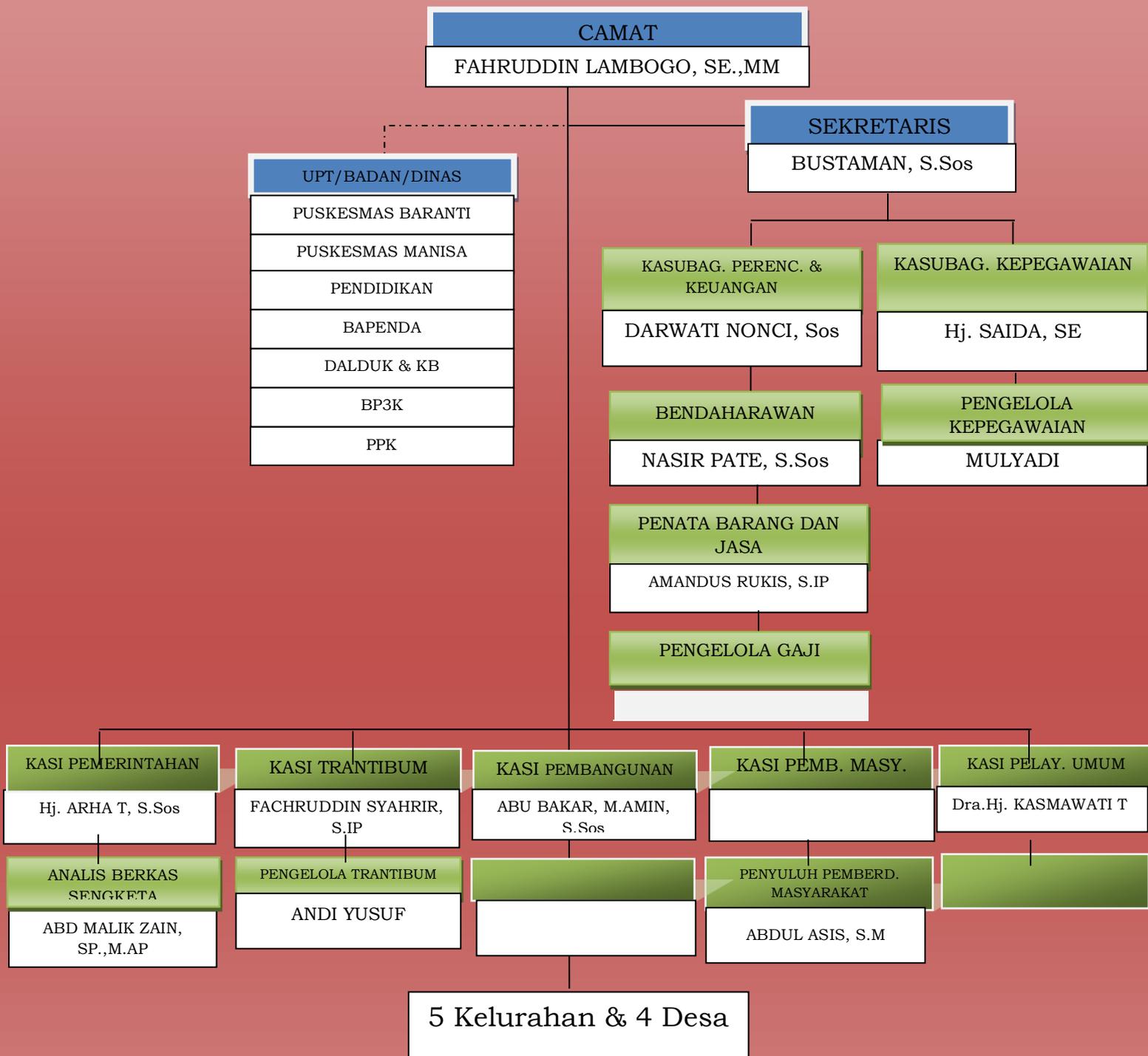
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Baranti dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi PEMERINTAH KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Baranti terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Baranti memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Baranti adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Baranti memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan Baranti memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan Baranti terdiri dari 18 (Delapan Belas) orang Laki-laki

dan 25 (dua puluh lima) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

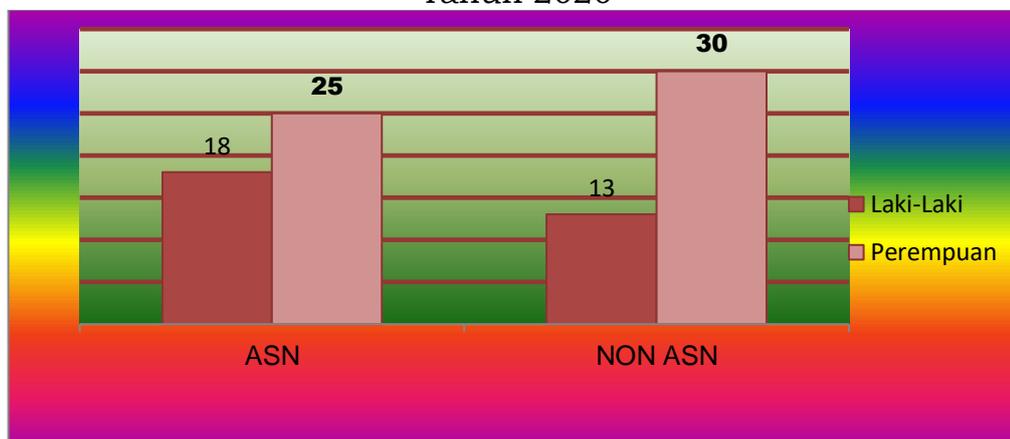
Komposisi SDM Berdasarkan Gender Kantor kecamatan Baranti Tahun 2020



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Baranti sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Baranti dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Baranti dibantu oleh 38 orang tenaga Non ASN. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Komposisi ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Baranti Tahun 2020



Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

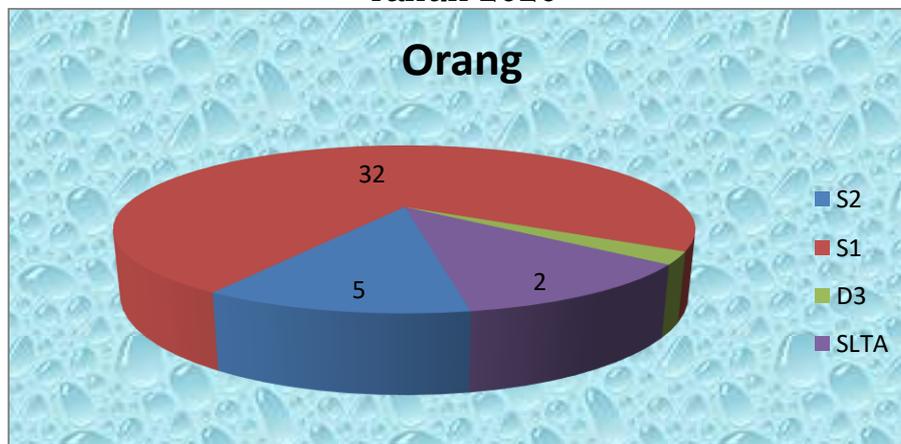
Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Baranti dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Baranti. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Baranti
Tahun 2020

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	5	4	1
2.	S1	32	10	22
3.	D3	1	1	0
4.	SLTA	5	3	2
JUMLAH		43	18	25

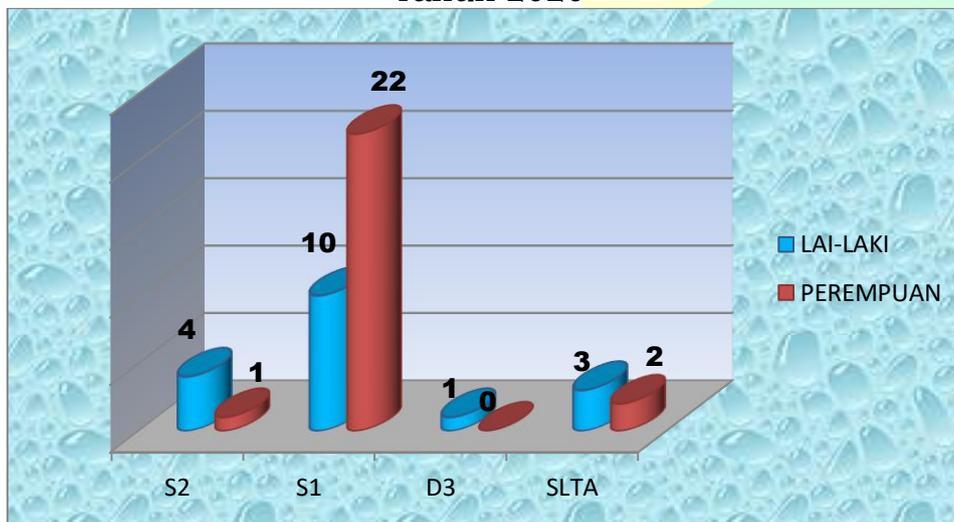
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Baranti
Tahun 2020



Sedangkan Komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan dan terpilah menurut Jenis Kelamin digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Komposisi ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin
Kecamatan Baranti
Tahun 2020



Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Baranti sebanyak 30 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN menurut jenjang eselon dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Baranti
Tahun 2020

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	FAHRUDDIN LAMBOGO, S.Sos	L	Camat	III
2.	BUSTAMAN, S.Sos	L	Sekcam	III
3.	Hj. ARHA T. UTTA, S.Sos	P	Kasi Pemerintahan	IVa.
4.	MUH. HARDI, SE	L	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IVa.
5.	FACHRUDDIN SYAHRIR, S.IP	L	Kasi Terantibum	IVa.
6.	ABUBAKAR M. AMIN, S.Sos	L	Kasi Pembangunan	IVa.
7.	Dra. Hj.KASMAWATI TEMMENG	P	Kasi Pelayanan Umum	IVa.
8	DARWATI NONCI, S.Sos	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IVb.
9.	Hj. SAIDA, S.Sos	P	Kasubag. Kepegawaian	IVb.
10	MUHAMMAD ARISAL ASAD, S.Pd, S.Sos, M.AP	L	LURAH BARANTI	IVa
11	Hj. MARWATI HAJI SIDDA, S.Sos	P	Seklur Baranti	IVb.
12	FATMAWATI, SH	P	Kasi Trantib Umum Kel Baranti	IVb.
13	Hj. SURIYATI. U, S. IP	P	Kasi Pemba & Pemberd Masy Kel. Baranti	IVb.
14	MULIATI MALIK, S. AP	P	Kasi Pemerintahan Kel. Baranti	IVb.
15	ANDI AHMAD, S. SOS	L	LURAH DUAMPANUA	IVa

16	Hj. HASNANI GANI	P	Sekretaris Lurah Duampanua	IVb.
17	ANDI MAPPABETA KORO	L	Kasi Pemba & Pemberd Masy Kel. Duampanua	IVb.
18	Hj. MASTURA, S. Pt	P	Kasi Trantib Umum Kel Duampanua	IVb.
19	RUSNINA, SE	P	Kasi Pemerintahan Kel. Duampanua	IVb.
20	TAKDIR ALI, S. IP., M. AP	L	LURAH MANISA	IVa.
21	RUSMIATI, SE	P	SEKLUR KEL. MANISA	IVb.
22	DARMAWATI, SE	P	Kasi Trantib Umum Kel Manisa	IVb.
23	MUNIR, SE	L	Kasi Pemerintahan Kel. Manisa	IVb.
24	NADIRAH S.Sos	P	Kasi Pemba dan Pemberd Kel. Kel. Manisa	IVb.
25	HASNI A. REMPANG, S. Sos	P	LURAH BENTENG	IVa.
26	E M M I, S. Sos., M. AP	P	Seklur Benteng	IVb.
27	M I S N A H, S. Sos	P	Kasi Trantib Umum Kel Benteng	IVb.
28	Hj. SITTI UMRAH, S. Sos	P	Kasi Pemba & Pemberd Masy. Kel. Benteng	IVb.
29	KARMILA, S.Sos	P	Kasi Pemerintahan Kel. Benteng	IVb.
30	HASNAH, S. Ag	P	LURAH PANRENG	Iva.
31	JAMALUDDIN, S. Sos	L	SEK. LURAH PANRENG	IVb.
32	HJ. HADRIAH NOHONG, S.Sos	P	Kasi Trantib Umum Kel Panreng	IVb.
33	ANDI TENRIWARU, S.Sos	P	Kasi Pemba. Pemberd Masy Kel. Panreng	IVb.
34	A. BUDI SETYAWAN, SH	L	Kepala Seksi Pemerintahan Kel. Panreng	IVb.

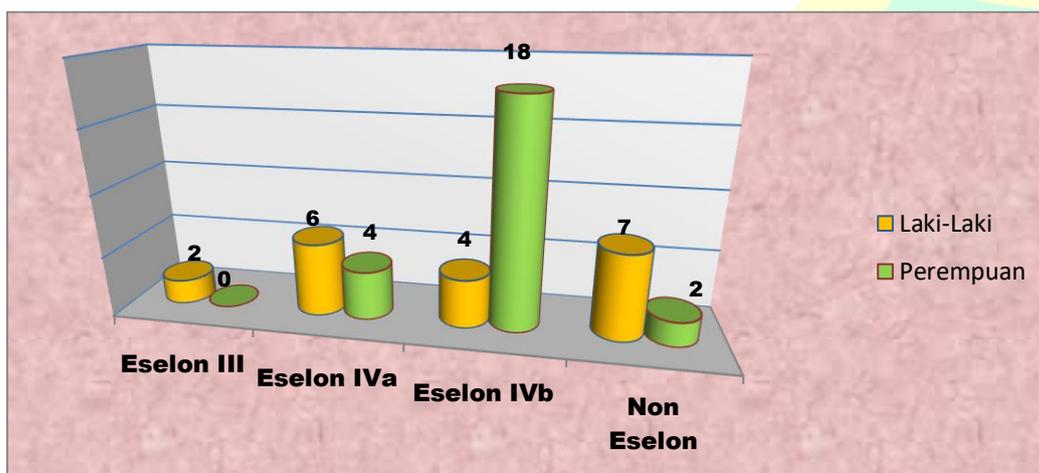
Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi ASN Non Eselon
Kantor Kecamatan Baranti
Tahun 2020

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	ABD MALIK ZAIN, SP.,M.AP	L	Analisis Berkas Sengketa
2.	AMANDUS RUKIS, S.IP	L	PranataBarang dan Jasa
3.	ABDUL ASIS, S.M	L	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat
4.	NASIR PATE, S.Sos	L	Analisis Pemerintahan
5.	A. YUSUF	L	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
6.	MULYADI	L	Pengelola Kepegawaian
7.	A. MARGAWATI, SE	P	Pengelola Pemberdayaan Masy Kel. Manisa
8.	SULTAN NURKHOLIS	L	Pengelola Pemberdayaan Masy Kel Benteng
9.	ANDI RADENG PABICARA	P	Pengadmistrasi Umum Kel. Panreng

Berikut digambarkan Komposisi ASN menurut Jenjang Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Jenjang Eselon dan dan Non Eselon



Komposisi ASN Menurut Golongan

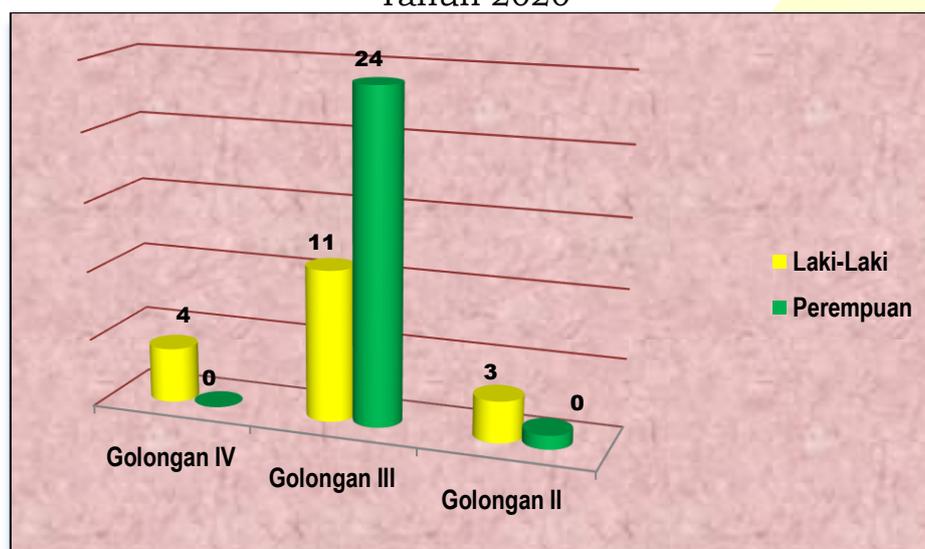
Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Baranti menurut golongan Tahun 2020. ASN di Kecamatan Baranti sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dimana golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, Golongan III sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan Golongan II sebanyak 4 (empat) Orang. ASN Kecamatan Baranti Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Baranti
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
1.	Golongan IV	4	0	4
2.	Golongan III	35	24	11
3.	Golongan II	4	1	3

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Baranti per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan
Kantor Kecamatan Baranti
Tahun 2020



1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Baranti dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baranti kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baranti dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

1.7 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BARANTI

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Baranti mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 4 Januari 2021, 061/001/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan visi, misi dan stategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Setiap Perangkat Daerah tidak memiliki Visi dan Misi. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi visi perangkat daerah yang harus direalisasikan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

MISI

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Kulo berada pada misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance sebagaimana dijelaskan pada penjabaran misi sebagai berikut :

Penjabaran Misi Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam pelayanan publik	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertatah dengan baik	Tidak sinkronnya data di tingkat Desa / Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial kemasyarakatan

TUJUAN

Berdasarkan misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance, dengan tujuan Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang maka pemerintah kecamatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan pada Masyarakat kecamatan Baranti.
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengakses Pembangunan

SASARAN

Adapun yang menjadi sasaran Pemerintah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Baranti.
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Baranti	Indeks Kepuasan Masyarakat	73
2.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	30%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Baranti sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Baranti sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Baranti

3.1.1a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2020 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Baranti				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	76,41	103,41

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 76 dari target sebesar 73 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Baranti	73	76,41	103,41

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Baranti diuraikan sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Baranti Tahun 2020

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA PELAYANAN	NILAI RATA-RATA HARAPAN	NILAI GAP	SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI (KNI)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN (X)
1	PERSYARATAN	3,083	3,000	0,083	0,339	77,083	B	BAIK
2	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	2,972	3,028	0,056	0,327	74,306	C	KURANG BAIK
3	WAKTU PELAYANAN	3,104	3,000	0,104	0,341	77,604	B	BAIK
4	BIAYA/TARIF	3,167	3,050	0,117	0,348	79,167	B	BAIK
5	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	3,083	3,111	0,028	0,339	77,083	B	BAIK
6	KOMPETENSI PELAYANAN	3,028	3,000	0,028	0,333	75,694	C	KURANG BAIK
7	PERILAKU PELAKSANA	3,188	3,000	0,188	0,351	79,688	B	BAIK
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,143	3,024	0,119	0,346	78,571	B	BAIK
9	SARAN DAN PRSARANA	2,021	2,958	0,063	0,332	75,521	C	KURANG BAIK
NILAI RATA-RATA		3,088	3,019	0,069	3,057	76,419	C	KURANG BAIK
INDEKS KEPUASAN DI KABUPATEN SIDRAP					76,419		C	KURANG BAIK

3.1.1b Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Baranti				
No.	Indikator	Realisasi		
		2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	76,41

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat kami perbandingkan. Hal ini dikarenakan survey yang dilakukan oleh tim survey Kabupaten Sidenreng Rappang terkait kepuasan masyarakat di kecamatan, data yang kami peroleh hanya pada Tahun 2020

3.1.1c Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Baranti				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi 2020
		RPJMD	Renstra	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,96	73	76,41

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dengan target jangka menengah dengan nilai 76,96 hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Baranti tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Baranti hanya sebesar 76,41 sedangkan target RPJMD sebesar 76,96. Sedangkan untuk target Renstra sebesar 73, maka realisasi tahun 2020 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

3.1.1d Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target Nasional.

Adapun terkait perbandingan Tahun ini dengan target Nasional, tidak dapat kami perbandingkan dengan alasan tidak adanya data yang kami ketahui terkait dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target Nasional
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76 %	-

3.1.1e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja Lingkup Pemerintah Kecamatan Baranti yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2020 adalah

penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Baranti.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Sistem, Kompetensi Pelayanan, Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaiki Sistem, Mekanisme serta Kompetensi Pelayanan, Sarana dan Prasarana.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Baranti yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Baranti.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan

3.1.2a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2020 “Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan ” dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kantor kecamatan Baranti dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Persen	30%	40%	130%

Capaian kinerja nyata Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan sebesar 40% dari target sebesar 30% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 130% atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 2

No	Sasaran	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	30 %	40%	10%

Evaluasi terhadap indikator Tingkat Parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan didapatkan dari tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Kegiatan yang dimaksud tersebut adalah :

a. Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan.

Pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan, setiap Desa/Kelurahan mengundang masyarakat sebanyak 60 orang. Jadi Total yang diundang 540 Orang dari 9 (Sembilan) Desa/Kelurahan dan rata-rata yang hadir sebanyak 20 orang sehingga total sebanyak 180 orang yang menandatangani daftar hadir. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut adalah sebesar 33%

b. Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan Baranti

Pada pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan Baranti mengundang masyarakat sebanyak 100 orang dan yang menandatangani daftar hadir sebanyak 76 orang Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut adalah sebesar 76%

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan di Kecamatan Baranti 640 orang yang diundang dan yang hadir 256 orang sebesar 40 %

3.1.2b Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini

sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 2				
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan				
No.	Indikator	Realisasi		
		2018	2019	2020
1.	Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	0	40	40

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.

3.1.2c Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Sasaran 2				
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD	Renstra	2020
1.	Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	100 %	30 %	40%

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan Tahun 2020 dengan target jangka menengah dengan nilai 40 hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Baranti Tahun 2020 dengan RPJMD dan RENSTRA



Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Baranti tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Baranti hanya sebesar 40 % sedangkan target RPJMD sebesar 100 %. Sedangkan untuk target Renstra sebesar 30 %, maka realisasi tahun 2020 sudah mencapai bahkan melewati target renstra yang telah ditetapkan.

3.1.2d Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target Nasional.

Adapun terkait perbandingan Tahun ini dengan target Nasional, tidak dapat kami perbandingkan dengan alasan tidak adanya data yang kami ketahui terkait dengan Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target Nasional
1.	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	40 %	-

3.1.2e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun analisis penyebab ketidakberhasilan indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan adalah adanya tingkat kejenuhan masyarakat dalam menghadiri pertemuan baik ditingkat Desa/Kelurahan maupun yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.

Secara Keseluruhan hasil pengukuran atas indikator Kinerja Utama Kecamatan Baranti Tahun 2020 menunjukkan hasil, sebagai berikut:

Hasil pengukuran atas indikator Kinerja Utama
Kecamatan Baranti
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	73 (C)	76,41 (C)	103,41 %
2.	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Persen	30 %	40%	130%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Baranti, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

3.1.f Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana.

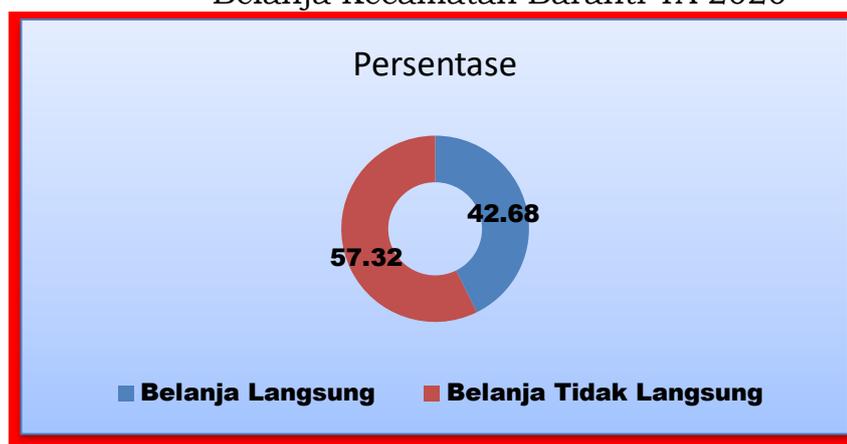
Rencana anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 7,890,138,000,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 10
Rencana Belanja Kecamatan Baranti TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persen
1	Belanja Tidak Langsung	3,367,708,000 ,-	42,68
2	Belanja Langsung	4,522,430,000 ,-	57,32
Jumlah		7,890,138,000,-	100

Adapun Rencna Belanja Kecamatan Baranti Tahun Anggaran 2020, dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Belanja Kecamatan Baranti TA 2020



Namun di bulan februari 2020 tersebar wabah diseluruh dunia yaitu merebaknya Virus Covid 19. Penyebaran Virus tersebut juga berdampak di Indonesia umumnya dan Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya. Seluruh wilayah terkena dampak virus tersebut yang membutuhkan banyak biaya untuk penanganan dan pencegahan merebaknya virus tersebut semakin meluas di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan Perubahan Anggaran untuk mengantisipasi biaya penanganan covid 19 di Kabupaten Sidrap. Perubahan anggaran dilakukan sebanyak dua kali perubahan. Rasionalisasi anggaran pun dilakukan sehingga mengakibatkan banyaknya kegiatan yang dirasionalisasi.

Rencana Anggaran Perubahan yang Pertama Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6,599,095,000.- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persen
1	Belanja Tidak Langsung	3,243,316,000 ,-	49
2	Belanja Langsung	3,355,779,000 ,-	51
Jumlah		6,599,095,000 ,-	100-

Rencana Anggaran Perubahan yang Kedua Tahun 2020 adalah sebesar Rp. **6,866,225,000.-** . Penambahan anggaran yang cukup signifikan adalah belanja Gaji dan Tunjangan ASN hal ini dikarenakan dengan adanya kenaikan pembayaran Tunjangan Kinerja berupa tambahan penghasilan ASN. Adapun anggaran perubahan kedua dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persen
1	Belanja Tidak Langsung	3,487,316,000 ,-	49
2	Belanja Langsung	3,378,909,000 ,-	51
Jumlah		6,866,225,000 ,-	100

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Baranti setelah perubahan kedua adalah sebesar Rp. **6.866.225.000,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **3.487.316.000,-** dan Rp. **3.378.909.000,-** untuk Belanja Langsung.

3.1.g Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah ketiga program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dari ketiga program tersebut dapat diuraikan kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan secara maksimal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - h. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun perencanaan dan diakomodir dalam program kegiatan, telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja kepala SKPD dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk sumber dana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. **3.229.532.864,-** atau sebesar 92,61 %, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar **Rp. 3.290.103.075** atau 97,37 %.

Secara Keseluruhan efisiensi penggunaan sumber dana sebesar **Rp. 6.519.635.939,-** atau sebesar 94,95 %.

Efisiensi penggunaan sumber daya digambarkan pada tabel berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.487.316.000,-	3.229.532.864,-	92,61
2	Belanja Langsung	3.378.909.000,-	3.289.329.541,-	97,35
	Jumlah	6,866,255.000	6,518,862.405,-	94,94

Anggaran dan realisasi setelah perubahan pada belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dijabarkan dalam 9 Kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar **Rp. 1.336.392.888,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.272.741.773,-**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dijabarkan dalam 5 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. **270.459.600,-** terealisasi sebesar **Rp. 261.065.824,-**

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Dijabarkan dalam 5 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. **1.772.056.512,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.755.521.944,-**

Realsasi anggaran untuk program kegaitan di tahun 2020 secara rinci dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Kecamatan Baranti
Tahun 2020

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja							
Belanja Tidak Langsung							
1.	Waktu penyediaan Belanja Gaji dan Tunjangan	14	14	92	2.911.403.000	2.656.256.061	92,24
2.	Waktu Penyediaan Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14	14	100	575.913.000	573.276.803	99,54
Belanja Langsung							
1	Jumlah Dokumen Bermaterai	500	484	96	3,315,000	2,955,000	96
2	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	89	51,369,000	47,126,805	89
3	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1		-	-	-	-
4	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa Pemeliharaan dan Perizinan	9	8	84	2,123,000	1,783,000	84
5	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	12	82	6,757,000	5,528,600	82
6	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	12	99	24,107,000	23,807,000	99
7	Waktu Penyediaan Alat Listrik dan elektronik	12	12	100	9,127,000	9,127,000	100
8	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	35	33	93	106,851,988	99,441,478	93
9	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	198	174	88	15,840,000	14,000,000	88
10	Waktu Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	97	1,116,902,900	1,083,256,200	97

11	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	112	112	100	83,332,000	83,332,000	100
12	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12	12	100	120,140,000	120,140,000	100
13	Jumlah dan Jenis Rumah Dinas yang dipelihara Rutin/Berkala				-	-	
14	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor secara Berkala	6	5	94	40,083,000	37,875,000	94
15	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas Operaional yang dipelihara rutin/berkala	8	6	81	21,684,600	17,521,664	81
16	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5	5	96	1,402,336,000	1,386,232,000	98,85
17	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	100	369,720,512	369,289,944	99,88

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

Target Renstra Kecamatan Baranti sebesar 73(C) tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni target RPJMD sebesar 76,96. Sedangkan realisasi Kecamatan Baranti hanya sebesar 76,41(C) telah melampaui target renstra yang telah ditetapkan, sehingga capaian Sasaran Strategis masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

2. **Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan**

Target Renstra Kecamatan Baranti Renstra sebesar 30% tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam RPJMD sebesar 100%. Sedangkan realisasi Kecamatan Baranti hanya sebesar 40% sudah mencapai bahkan melewati target renstra yang telah ditetapkan sehingga capaian Sasaran Strategis masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**, namun masih belum mencapai target RPJMD.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Baranti, 31 Januari 2021
CAMAT BARANTI

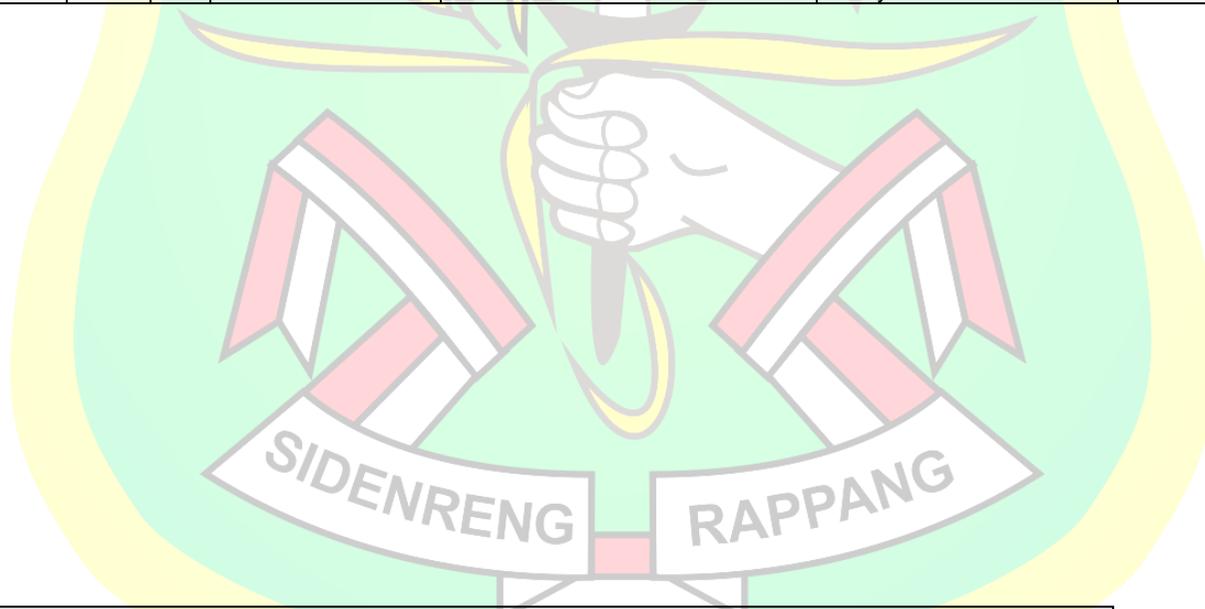
BUSTAMAN, S.Sos
NIP. 19720523 199203 1 005

TABEL RENCANA AKSI

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Rencana				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran Rp.	
				I	II	III	IV					
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Baranti	Indeks Kepuasan Masyarakat	2020		√	√	√	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	3,315,000	
				√	√	√	√		Penyediaan jasa komunikasi , SD air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,369,000	
									Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	
					√	√			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa Pemeliharaan dan Perizinan	2,123,000	
				√	√	√	√		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6,757,000	
				√	√	√	√		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24,107,000	
				√	√	√	√		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Waktu Penyediaan Alat Listrik dan elektronik	9,127,000	
				√	√	√	√		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	106,851,988	
				√	√	√	√		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	15,840,000	
				√	√	√	√		Pelayanan Administrasi Perkantoran Lainnya	Waktu Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,116,902,900	
						√			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	83,332,000
						√				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor	120,140,000

						√					yang diadakan		
											Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah dan Jenis Rumah Dinas yang dipelihara Rutin/Berkala	-
											Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor secara Berkala	40,083,000
				√	√	√	√				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas Operaional yang dipelihara rutin/berkala	21,684,600
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam mengakses Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan			√	√	√		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,402,336,000
					√						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	369,720,512



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2020



KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baranti Tahun 2020 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Baranti, 31 Januari 2021

CAMAT BARANTI,

BUSTAMAN, S.Sos

NIP. 19720523 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	
1.5 Komposisi SDM Organisasi.....	5
1.6 Isu Strategis	11
1.7 Landasan Hukum	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Baranti	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	16
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2 Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	33